

**TRANSFORMASI EKONOMI YANG BERBASIS SUMBER DAYA ALAM (SDA) DALAM
RANGKA PENCIPTAAN NILAI TAMBAH EKSPORT DAN KOMPETITIVNES INDONESIA
DI NEGARA ASEAN**

(STUDI KASUS PROPINSI PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA)

DR. AJI SOFYAN EFFENDI,SE,MSi

**PUSAT STUDI ASEAN UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA, KALIMANTAN
TIMUR**

ABSTRAKSI

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan ASEAN yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti Minyak dan gas bumi, Batubara, Sawit, Emas, Nikel, dan berbagai sumber daya alam lainnya, baik yang berasal dari sector mineral, pertanian, perkebunan maupun perikanan, sector-sektor ini tidak dimiliki oleh Negara-negara ASEAN lainnya, sejatinya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya, namun fakta empiris menunjukkan sebaliknya Pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam dan lainnya, di Indonesia terjadi Anomali Pembangunan, Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang mestinya bisa membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi justru sebaliknya, tidak berjalan searah dan lurus, justru berbanding terbalik, sumber produksi SDA melimpah tapi Pertumbuhan ekonomi rendah, di Indonesia tidak memiliki korelasi langsung antara sumber produksi SDA yang melimpah dengan pertumbuhan ekonomi

Hal tersebut diatas terlihat dari fakta empiris dari penelitian penulis yang dituangkan dalam paper ini, dengan mengambil sampel daerah/propinsi penghasil sumber daya alam (SDA) yang meliputi : ***Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Riau, Propinsi Aceh, Propinsi Papua & Papua Barat, serta Propinsi Sumatera Selatan***, dengan mengambil Data Panel selama 10 Tahun terakhir, dari tahun 2005-2015, sebagai pembanding adalah daerah/Propinsi Bukan Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi seluruh Propinsi di Indonesia, selain daripada 5 Propinsi tersebut diatas,

Hasil analisis data yang penulis dapatkan, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1 : Rata-Rata Indikator Kesejahteraan Rakyat
Daerah Penghasil SDA & Daerah Bukan Penghasil SDA di Indonesia
Tahun 2005-2015

No	Indikator Kesra	Daerah SDA	Daerah Non SDA
1	PDRB/Kapita	31.994,39	19.995,47
2	Ratio tahunan thd PDRB/Kapita	0,6362	0,9362
3	Tingkat Pengangguran	9,78	9,07
4	Tingkat Kemiskinan	22,02	15,12
5	AKB	26,01	18,08
6	AHH	70,8	73,05
7	IPM	71,0	72,67
8	RT dgn Air bersih	72,61	89,46
9	RT dgn Listrik	77,57	98,04
10	Ketimpangan Regional	0,7056	0,6668
11	Derajat penghisapan ekonomi	80,14	37,89

Sumber data : Diolah dari hasil Penelitian Penulis, 2016.

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa semua Indikator Kesejahteraan Rakyat yang berada di daerah Sumber Daya Alam, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah Non Sumber daya Alam, artinya daerah yang berbasis sumber daya alam dapat dikatakan masih jauh tertinggal kesejahteraannya bila dibandingkan dengan daerah Non Sumber daya alam, Faktor penyebab utama dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah sumber daya alam bukan akibat “ Kegagalan Pemerintah Daerah “, tapi disebabkan oleh tingginya Derajat Penghisapan ekonomi dan sumber daya alam di daerah, yang dilakukan oleh entitas bisnis yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam, seperti Migas, Penggalian (batu bara) Perkebunan (kelapa sawait) dan lain-lain, dengan angka derajat penghisapan sebesar, 80 14 % (artinya : seluruh Kekayaan sumber daya alam daerah, 80,14 % dinikmati oleh entitas bisnis di luar daerah sumber daya alam, sebagian besar oleh Perusahaan Asing, terjadi capital outflow, kekayaan daerah yang dimiliki dan dirasakan oleh masyarakat di daerah sumber daya alam hanya 19,86 %. Inilah yang mengakibatkan mengapa Pengangguran dan angka kemiskinan di daerah / Propinsi penghasil sumber daya alam jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah/propinsi bukan peghasil sumber daya

alam, yaitu sebesar 9,78 % (daerah SDA) dan 9,07 % (NSDA) untuk pengangguran dan 22,02 % (daerah SDA) dan 15,12 % (NSDA) untuk tingkat kemiskinan, seperti yang tertera pada table tersebut diatas, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah angka kematian bayi di daerah penghasil sumber daya alam jauh lebih tinggi, yaitu ada 26 bayi meninggal dunia per 1000 kelahiran sementara di daerah/propinsi bukan penghasil sumber daya alam hanya 16 bayi meninggal per 1000 kelahiran, salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi ini adalah sebagai akibat pencemaran lingkungan dan kualitas lingkungan yang rusak akibat massive nya eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Faktor mendasar dari rendahnya tingkat kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya alam tersebut adalah, karena masih belum adanya transformasi ekonomi daerah SDA yang lebih kompetitif, sehingga nilai jual ekspor daerah tersebut rendah, karena produk sumber daya alam tersebut di ekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material) tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi (final good) seperti barang pabrik industry, kalau kita ambil secara runtut per daerah di Indonesia yang surplus dalam neraca perdagangan di Negara ASEAN sebagian besar berasal dari produk barang-barang Pulau Jawa, seperti home industry, UMKM sidoarjo, serta beberapa wilayah lainnya di Indonesia, namun bukan berasal dari produk sumber daya alam.

Oleh sebab itulah dalam rekomendasi dalam paper ini, dapat dikemukakan bahwa transformasi ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, apabila kita menginginkan ekonomi Indonesia kompetitif di Negara ASEAN, terutama ekspor yang berasal dari sumber daya alam di daerah Propinsi Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Riau dan Sumatera Selatan.

Konfrensi dan pertemuan antar Pusat Studi Asean (PSA) di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri ini, diharapkan dapat menegaskan kembali agenda transformasi ekonomi Indonesia bukan hanya slogan tapi memang dapat dilaksanakan secara konsekwen dan dukungan pemerintah serta legislative secara penuh.

A. LATAR BELAKANG.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti Minyak dan gas bumi, Batubara, Sawit, Emas, Nikel, dan berbagai sumber daya alam lainnya, baik yang berasal dari sektor mineral, pertanian, perkebunan maupun perikanan, sektor-sektor ini tidak dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya, sejatinya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, namun fakta empiris menunjukkan sebaliknya pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam dan lainnya, di Indonesia terjadi Anomali Pembangunan, Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang mestinya bisa membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi justru sebaliknya, tidak berjalan searah dan lurus, justru berbanding terbalik, sumber produksi SDA melimpah tapi pertumbuhan ekonomi rendah, di

Indonesia tidak memiliki korelasi langsung antara sumber produksi SDA yang melimpah dengan pertumbuhan ekonomi.

Padahal, secara teori dan fakta empiris di negara lain, seperti Timur Tengah, Bolivia, Venezuela, kepemilikan sumber daya alam oleh suatu negara berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang tercipta di negara tersebut.

Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dicermati dari seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhannya. Industri dan pertumbuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang, karena industri identik dengan nilai tambah, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonominya. Peran strategis sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi, bukan tanpa alasan, karena sektor industri akan membawa dampak turunan, yakni meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Kemajuan ekonomi China dan Korea Selatan setidaknya memberikan pelajaran berharga, terhadap pilihan strategi pembangunan ekonomi yang menjadikan industrialisasi sebagai salah satu pilar, yang berkontribusi memacu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto China yang mencapai 10 persen setiap tahunnya dengan pertumbuhan industrinya mencapai 17 persen. Kehebatan ekonomi China sejatinya merupakan buah dari program reformasi ekonomi yang dimulai pada 1979 oleh Deng Xiaoping, yang meletakkan dasar bagi sistem ekonomi yang memungkinkan pasar bebas dan industri kecil di pedesaan berkembang pesat di seluruh negeri.

Jauh sebelumnya, Mao Zedong dan Zhou Enlai telah membangun fondasinya, melalui penancangan program *The Great Leap Forward* (Lompatan Besar ke Depan) pada 1958. Mereka berharap China menjadi negara industri maju dalam waktu singkat. Titik beratnya adalah pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri mesin dan baja, juga produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus ekspor

Korea Selatan merupakan contoh kemajuan bangsa lainnya yang menjadikan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1950 Korsel merupakan salah satu negara termiskin di dunia, ekonominya hanya bersandar pada sektor pertanian, namun

dengan strategi industrialisasi yang diterapkan kemajuan ekonomi Korea Selatan berlangsung pesat. Kesuksesan Korea Selatan melakukan pembangunan negaranya secara mudah dapat dilihat dari peningkatan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dari tahun 1960 sampai 2012. PDB perkapita Korea Selatan mengalami kenaikan sekitar 14,6 kali lipat. Ini merupakan lompatan terbesar yang pernah dicapai dalam pembangunan ekonomi suatu negara di dunia sampai saat ini. Tahun 1963, PDB perkapita Korea Selatan Cuma \$100, tahun 1995 telah mencapai 10.000 dollar AS, dan tahun 2007 meningkat menjadi 25.000 dollar AS. Produk-produk elektronik Korsel, Samsung dan LG telah menguasai dunia, dari ponsel canggih, televisi plasma, LCD sampai semikonduktor. Industri pembuatan kapal Korsel, Hyundai dan Samsung Heavy Industries juga menunjukkan kedigdayaannya. Ekonomi Korsel juga dibangun dengan sokongan industri-industri standar negara berkembang, tekstil, sepatu, industri berat dan strategis, baja, otomotif, perkapalan, pemerintah Korsel memberikan dukungan yang kuat untuk dunia usaha, infrastruktur, pajak yang rendah untuk industri unggulan.

Belajar dari kemajuan ekonomi China dan Korsel, data historis menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan kata kunci dalam menggenjot kemajuan ekonomi suatu bangsa. Industrialisasi, selain dapat meningkatkan arus masuk investasi, juga akan membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya dan menciptakan *multiplier effect* di sektor perdagangan.

B. ISI (FAKTA EMPIRIS)

Dalam paper ini, untuk membuktikan judul paper tersebut diatas, Penulis mengambil sampel daerah/Propinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA) meliputi : **Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Riau, Propinsi Aceh, Propinsi Papua & Papua Barat, serta Propinsi Sumatera Selatan**, dengan mengambil Data Panel selama 10 Tahun terakhir, dari tahun 2005-2015, sebagai pembanding adalah daerah/Propinsi Bukan Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi seluruh Propinsi di Indonesia, selain daripada 5 Propinsi tersebut diatas,

Hasil analisis data yang penulis dapatkan, dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 1 : Rata-Rata Indikator Kesejahteraan Rakyat
Daerah Penghasil SDA & Daerah Bukan Penghasil SDA di Indonesia
Tahun 2005-2015

No	Indikator Kesra	Daerah SDA	Daerah Non SDA
1	PDRB/Kapita	31.994,39	19.995,47

2	Ratio tahunan thd PDRB/Kapita	0,6362	0,9362
3	Tingkat Pengangguran	9,78	9,07
4	Tingkat Kemiskinan	22,02	15,12
5	AKB	26,01	18,08
6	AHH	70,8	73,05
7	IPM	71,0	72,67
8	RT dgn Air bersih	72,61	89,46
9	RT dgn Listrik	77,57	98,04
10	Ketimpangan Regional	0,7056	0,6668
11	Derajat penghisapan ekonomi	80,14	37,89

Sumber data : Diolah dari hasil Penelitian Penulis, 2016.

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa semua Indikator Kesejahteraan Rakyat yang berada di daerah Sumber Daya Alam, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah Non Sumber daya Alam, artinya daerah yang berbasis sumber daya alam dapat dikatakan masih jauh tertinggal kesejahteraannya bila dibandingkan dengan daerah Non Sumber daya alam, Faktor penyebab utama dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah sumber daya alam bukan akibat “ Kegagalan Pemerintah Daerah “, tapi disebabkan oleh tingginya Derajat Penghisapan ekonomi dan sumber daya alam di daerah, yang dilakukan oleh entitas bisnis yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam, seperti Migas, Penggalan (batu bara) Perkebunan (kelapa sawait) dan lain-lain, dengan angka derajat penghisapan sebesar, 80,14 % (artinya : seluruh Kekayaan sumber daya alam daerah, 80,14 % dinikmati oleh entitas bisnis di luar daerah sumber daya alam, sebagian besar oleh Perusahaan Asing, terjadi *capital outflow*, kekayaan daerah yang dimiliki dan dirasakan oleh masyarakat di daerah sumber daya alam hanya 19,86 %.) Inilah yang mengakibatkan mengapa Pengangguran dan angka kemiskinan di daerah / Propinsi penghasil sumber daya alam jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah/propinsi bukan peghasil sumber daya alam, yaitu sebesar 9,78 % (daerah SDA) dan 9,07 % (NSDA) untuk pengangguran dan 22,02 % (daerah SDA) dan 15,12 % (NSDA) untuk tingkat kemiskinan, seperti yang tertera pada table tersebut diatas, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah angka kematian bayi di daerah penghasil sumber daya alam jauh lebih tinggi, yaitu ada 26 bayi meninggal dunia per 1000 kelahiran sementara di daerah/propinsi bukan penghasil sumber daya alam hanya 16

bayi meninggal per 1000 kelahiran, salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi ini adalah sebagai akibat pencemaran lingkungan dan kualitas lingkungan yang rusak akibat masifnya eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Faktor mendasar dari rendahnya tingkat kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya alam tersebut adalah, karena masih belum adanya transformasi ekonomi daerah SDA yang lebih kompetitif, sehingga nilai jual ekspor daerah tersebut rendah, karena produk sumber daya alam tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi (*final good*) seperti barang pabrik industri, kalau kita ambil secara runtut per daerah di Indonesia yang surplus dalam neraca perdagangan di Negara ASEAN sebagian besar berasal dari produk barang-barang Pulau Jawa, seperti *home industry*, UMKM Sidoarjo, serta beberapa wilayah lainnya di Indonesia, namun bukan berasal dari produk sumber daya alam,

C. ANALISIS STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI.

Cukup banyak teori-teori yang mendukung betapa pentingnya kita melakukan transformasi ekonomi sumber daya alam tersebut untuk menjadi industri sumber daya alam (strategi dari hulu menjadi hilir) adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, daerah yang cerdas dan negara yang cerdas (seperti Singapura) telah meletakkan dasar transformasi ekonomi dalam setiap kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahun, negara yang miskin SDA seperti Singapura tersebut ternyata mampu melakukan transformasi ekonomi dengan menetapkan kebijakan negara sebagai landasan hukumnya dimana setiap orientasi bisnis singapura selalu dalam bentuk industri hilir, dan hal ini ditaati oleh setiap entitas bisnis di Singapura

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dikaruniai sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang besar, potensi yang dimiliki Indonesia itu selain dapat menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa, juga akan mempercepat transformasi negeri ini menjadi negara maju. Dengan sumber daya alam (SDA) yang beragam serta angkatan kerja dan pasar yang besar, sangat terbuka pilihan Indonesia untuk industrialisasi. Era *comodity booming*: harga minyak, kayu, dan mineral dan pertambangan (minerba) harus segera diakhiri, saatnya kita meningkatkan processing ekspor bahan mentah (hilirisasi) sebagai strategi substitusi ekspor.

Kita patut bersyukur industrialisasi menjadi strategi dalam Nawa Cita, yang didorong pengembangannya dengan orientasi pada upaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Presiden Jokowi dalam kesempatan berdiskusi dengan para ekonom, di Istana Negara, Jakarta, 13 November 2015 lalu, kembali menekankan pentingnya industrialisasi, sebagai langkah efektif dalam membuka lapangan kerja serta menggenjot ekspor sekaligus mengatasi masalah defisit neraca perdagangan.

Dari kemajuan pembangunan ekonomi China dan Korsel serta refleksi dari perjalanan panjang pembangunan ekonomi Indonesia, setidaknya kita dapat menarik pelajaran berharga untuk menjadikan industrialisasi sebagai pionir pembangunan ekonomi. Kita perlu mendukung secara optimal percepatan transformasi fundamental ekonomi dari yang semula selalu bertumpu pada konsumsi, penjualan komoditi dan bahan mentah menjadi fokus ke produksi, investasi dan industrialisasi.

Mengingat secara historis peran Industri Manufaktur dalam PDB Indonesia telah merosot secara persisten, salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah derap industrialisasi yang meredup.

Setelah krisis 1998, pertumbuhan sektor industri manufaktur hampir selalu lebih rendah ketimbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Sebelum krisis 1998, pertumbuhan industri manufaktur sempat dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Setelah mencapai tingkat tertinggi pada 2001 sebesar 29 persen, sumbangsih industri manufaktur terus merosot sampai mencapai titik terendah pada triwulan II 2015 sebesar 20,9 persen.

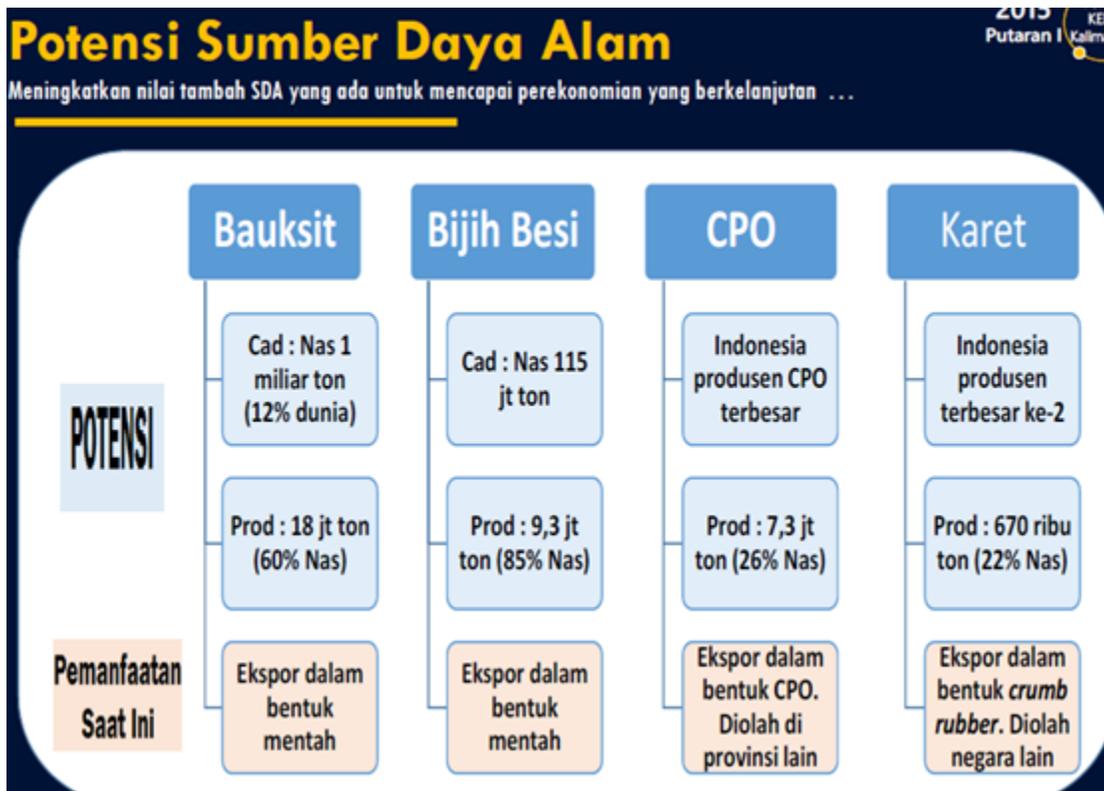
Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur juga belum mampu menjadi exit strategi dalam mengatasi masalah pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah angkatan kerja 2015 tercatat menjadi 122,38 juta orang. Jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2014 yang sebanyak 121,87 juta jiwa, angkatan kerja bertambah 510 ribu orang. Secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2015 menjadi sebesar 6,18 persen, naik dari 5,94 persen pada Agustus 2014.

Pengembangan yang masif industrialisasi, utamanya padat modal diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran penyerapan tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan industri ekonomi kreatif (mebel dan kerajinan), industri perikanan dan pertanian dan industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat fokus pada upaya penanganan beberapa isu strategis yang dapat mengganggu akselerasi pengembangan industrialisasi di Indonesia, utamanya terkait isu kepastian dan kenyamanan investor, dengan mengatasi masalah anarkisme buruh, percepatan perizinan, memastikan berbagai regulasi dan insentif teraplikasi ditingkat operasional. Peningkatan peran industri menjadi sangat penting, jika Indonesia ingin bergerak lebih maju, sektor manufaktur harus tumbuh dan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas perekonomian, sekaligus solusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, karena industrialisasi sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial. Industrialisasi diyakini dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, dan proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan dapat membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa stabilitas ekonomi makro, iklim usaha dan investasi yang sehat sehingga dapat dijadikan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

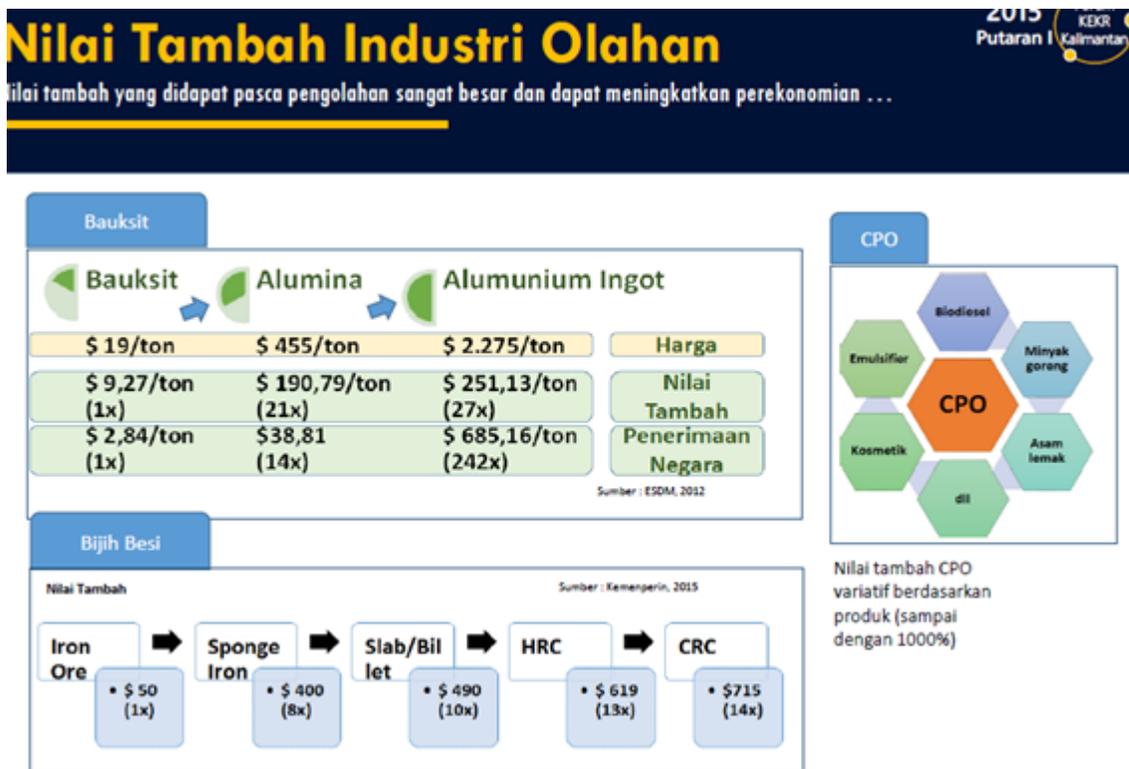
Oleh karena itu sektor industri perlu diarahkan agar memiliki daya saing yang tinggi karena kuatnya struktur, tingginya peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sepanjang rantai nilai produksi, dan dukungan dari seluruh sumber daya produktif. Upaya membangun keterkaitan industri hulu-hilir perlu terus ditingkatkan, hal ini tentunya membutuhkan kesepahaman dan kesamaan visi industrialisasi dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan K/L baik di pusat dan daerah. Besarnya investasi dan pelibatan kalangan investor perlu terus diimbangkan dengan deregulasi di bidang perizinan dan prosedur investasi serta pengembangan pelayanan satu atap agar “kelenturan” birokrasi dalam mendukung percepatan industrialisasi dapat berjalan optimal.

Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 : Potensi Sumber Daya Alam Indonesia



Gambar 2 : Nilai Tambah Industri Olahan apabila terjadi Transformasi



Gambar tersebut diatas menunjukkan seandainya Indonesia mampu menciptakan nilai tambah dengan melakukan transformasi ekonomi maka dampaknya terhadap penerimaan Negara sangat besar sekali, sebagai contoh untuk Bauksit menjadi alumunium ingot penerimaan Negara menjadi 242 x lipat, untuk bijih besi dari iron ore menjadi CRC, penerimaan Negara akan naik 14 x lipat.

Oleh sebab itulah Kerja keras dan fokus perlu terus diupayakan agar target pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor industri sebagaimana yang telah digariskan dapat dicapai dengan memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas SDM melalui peran aktif menyukseskan program pendidikan formal maupun non-formal seperti balai latihan kerja (BLK) dan alih teknologi yang menjadi kata kunci suksesnya industrialisasi. Sikap optimistis perlu terus ditumbuhkan, pondasi ekonomi yang telah dibangun, agar dapat menjadi pijakan dalam transformasi ekonomi, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia merebut peluang pasar pemberlakuan MEA 2015 dan mengantarkan kejayaan ekonomi Indonesia.

Disisi lain, belajar dari Negara-negara lain selain dar Negara di kawasan ASEAN, dapat dipahami bahwa Transformasi struktur ekonomi pada dasarnya bangunan ekonomi suatu negara tersusun dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer mencakup sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan komoditas mentah dengan cara mengekstraksi SDA dari ekosistem alam (seperti penangkapan ikan, penebangan pohon hutan, dan pertambangan) atau dengan membudidayakan tanaman, hewan, ikan, dan organisme lainnya, seperti pertanian, perkebunan, hutan tanaman industri, peternakan, dan perikanan budidaya. Dalam khasanah pembangunan Indonesia, sektor primer terdiri dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan ESDM. Sedangkan, sektor sekunder adalah industri manufaktur yang meliputi industri pengolahan SDA, bioteknologi, elektronik, otomotif, mesin dan peralatan mesin, kimia, teknologi informasi (hardwares dan softwares), nanoteknologi, dan lainnya. Sementara itu, sektor tersier mencakup semua sektor jasa (seperti kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan, perdagangan, keuangan, transprotasi, konstruksi, perumahan, dan konsultansi), pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Fakta empiris menunjukkan bahwa seluruh negara maju dan makmur, seperti yang tergabung dalam OECD dan dewasa ini Turki, Malaysia, Tiongkok, dan emerging economies

lainnya adalah mereka yang sukses melaksanakan transformasi struktural ekonominya. Yakni negara yang pada masa awal kelahiran (kemerdekaan) nya, matapencaharian sebagian besar penduduk dan ekonomi (PDB) nya bertumpu pada sektor primer. Kemudian dalam waktu relatif cepat (setelah 25 – 50 tahun), pekerjaan sebagian besar rakyat dan ekonominya bergantung pada sektor sekunder dan sektor tersier yang produktif, berdayasaing, dan berkelanjutan.

Contohnya, pada awal masa pembangunannya, sekitar 40 – 70 persen penduduk negara-negara OECD (AS, Kanada, Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan kontribusi sektor primer ini terhadap PDB nya sekitar 40 – 75 persen. Lalu, sejak menjadi negara maju dan makmur, rakyat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak lebih dari 15% total penduduk. Sementara kontribusi ketiga sektor primer ini terhadap PDB nya masih cukup besar, sekitar 20 – 45 persen. Mayoritas penduduk dan ekonominya beralih ke sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif dan berdayasaing. Walhasil, di negara-negara industri maju tersebut, rakyat dengan pendapatan yang tinggi (sejahtera) bukan hanya mereka yang bekerja di sektor sekunder dan tersier, tetapi juga para petani dan nelayan. Sebab, dengan jumlah (proporsi) petani dan nelayan yang semakin menurun, mereka bisa berusaha pertanian dan perikanan dengan ukuran unit usaha (bisnis) yang tetap besar atau semakin besar, sehingga memenuhi skala ekonomi. Lebih dari itu, para petani dan nelayan pun bisa menggunakan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang lebih modern (produktif dan efisien), tanpa merusak lingkungan atau mengancam kelestarian SDA. Mereka pun mampu mengorganisir diri dan melakukan manajemen usaha dengan baik. Sehingga, memiliki posisi tawar yang tinggi untuk setiap saat mendapatkan sarana produksi yang berkualitas dengan harga relatif murah, dan dapat memasarkan produknya dengan harga jual sesuai nilai keekonomiannya.

Apakah Indonesia telah berhasil melakukan transformasi struktural ekonominya?. Transformasi struktural ekonomi yang sukses, sebagaimana terjadi di negara-negara maju di atas, adalah ketika jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) menurun, diikuti dengan kenaikan kontribusi sektor ini terhadap PDB atau setidaknya tetap, dan semakin besarnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor sekunder dan tersier. Faktanya, pada masa Orde Lama (1945 - 1965), rakyat yang bekerja di sektor pertanian sekitar 65% total penduduk, dan sumbangan sektor ini bagi PDB sebesar 50 persen. Di zaman Orde Baru (1966 – 1997), sekitar 60 – 40 persen penduduk bekerja di

sektor pertanian, dan kontribusi sektor ini terhadap PDB menurun tajam, sekitar 40 – 20 persen. Sejak awal Reformasi (1998) sampai sekarang, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun semakin tajam, sekitar 20 – 14 persen. Sementara itu, jumlah petani dan nelayan hanya turun sedikit dan sangat lamban, menjadi 38 – 35 % total penduduk.

Hasil penelitian Pakpahan (2004) menunjukkan fenomena serupa: pada periode 1960 – 2003 setiap penurunan 1 persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya diikuti pangsa tenaga kerja pertanian kurang dari 0,5 persen. Bandingkan dengan di Korea Selatan: tiap penurunan pangsa PDB pertanian 1 persen diikuti penurunan pangsa tenaga kerja pertanian dua kali lipat. Idealnya, jika pangsa PDB pertanian sebesar 14% seperti sekarang di Indonesia, maka pangsa tenaga kerja pertanian maksimal 20 persen (Khudori, 2015).

Data diatas dengan gamblang mengungkapkan, bahwa Indonesia belum berhasil melakukan transformasi struktural ekonominya. Sektor sekunder dan tersier belum secara signifikan menyerap surplus tenaga kerja dari sektor pertanian. Akibatnya terjadi involusi pertanian, yang tercermin dari semakin menurunnya pendapatan petani dan nelayan dari waktu ke waktu. Bayangkan, per Maret 2014 sekitar 62 persen dari total rakyat miskin Indonesia (28,3 juta orang) adalah petani dan nelayan, dan rata-rata pendapatan rumah tangga petani dan nelayan hanya Rp 1 juta per bulan, jauh dari UMR di DKI Jakarta sebesar Rp 3, 2 juta per bulan (BPS, 2014). Saat ini pendapatan petani dan nelayan sebesar itu hanya cukup untuk menopang seperempat total kebutuhan hidup keluarga mereka setiap bulannya. Sisanya diperoleh dari matapencaharian tambahan di luar pertanian atau perikanan, seperti sebagai tukang ojek, buruh bangunan, berdagang, istrinya menjadi TKW di luar negeri, dan lainnya.

Sementara itu, pendapatan dan kesejahteraan pekerja (buruh) industri pun belum setinggi di Turki, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan emerging economies lainnya, apalagi dibandingkan dengan di negara-negara OECD. Dengan perkataan lain, industrialisasi di Indonesia selama ini justru telah membebani sektor pertanian, memiskinkan petani dan nelayan.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Tidak ada kata terlambat. Dengan modal dasar pembangunan yang sangat besar dan bonus demografi yang kita miliki hingga 2030, Indonesia mestinya mampu melaksanakan transformasi struktural ekonomi dengan gemilang. Untuk itu, pertama yang harus dilakukan adalah dengan merevitalisasi seluruh sektor ekonomi yang ada saat ini supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable). Dengan cara memastikan bahwa seluruh unit usaha, khususnya UMKM, harus memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi mutakhir yang tepat, manajemen sistem rantai suplai secara terpadu dari hulu (produksi) sampai hilir (pasar), dan ramah lingkungan. Kedua, mengembangkan sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif, berdaya saing, menyerap banyak tenaga kerja, adil, dan ramah lingkungan. Mengingat disparitas pembangunan antar wilayah (Jawa vs luar Jawa, dan desa vs kota) yang sangat timpang. Maka, pengembangan kawasan industri (ekonomi), sektor sekunder dan tersier yang baru semestinya dilaksanakan di luar P. Jawa dan Bali, daerah perdesaan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan.

Selain industri manufaktur yang sejak Orde Baru sudah menjadi unggulan nasional, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), makanan dan minuman, otomotif, dan elektronik; dalam jangka pendek – menengah kita harus menggenjot industri manufakturing (pengolahan) berbasis SDA. Pengolahan SDA, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dapat menghasilkan ratusan jenis produk setengah jadi maupun produk akhir (final products) dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, dan multiplier effects yang sangat luas. Contohnya jenis rumput laut *Eucheuma spp* bila diproses bisa menghasilkan tidak kurang dari 500 jenis produk akhir, seperti farmasi, kosmetik, cat, film, bahan pelapis pesawat terbang, dan bioenergi. Demikian juga minyak sawit mentah (CPO), karet, dan komoditas terbarukan lainnya. LNG selain merupakan sumber energi primer untuk pembangkit listrik, juga bisa diproses untuk menghasilkan pupuk, tekstil, polietelin, dan beragam produk pertokimia lainnya. Nilai ekonomi produk petrokimia dari LNG mencapai 70 kali lipat lebih besar ketimbang kita mengekspor LNG dalam keadaan mentah (Rauf, 2007). Kebijakan dan program hilirisasi mineral (seperti tembaga, nikel, bijih besi, bauksit, dan mangan) dan pengembangan EBT (energi baru dan terbarukan) harus lebih ditingkatkan secara berkesinambungan. Industri logam, mesin dan peralatan mesin, dan kimia dasar yang merupakan ‘ibunya industrilaisasi’ (mother of

industrialization) sebuah bangsa juga mulai sekarang harus lebih dimaksimalkan. Demikian pula halnya dengan industri farmasi, terutama industri hulunya.

Karena kita memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang luar biasa besarnya, sektor tersier yang harus mendapat perhatian khusus dalam jangka pendek –menengah adalah pariwisata. Malaysia, Thailand, dan Singapura sangat cerdas memanfaatkan peluang industri pariwisata. Hasilnya, tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan asing (wisman) ke tiga negara tersebut secara berurutan mencapai 30, 29, dan 14 juta orang dengan perolehan devisa lebih dari 20 milyar dolar AS. Sementara jumlah wisman ke Indonesia hanya 9,4 juta orang dengan perolehan devisa sekitar 10 milyar dolar AS. Ekonomi kreatif juga merupakan sektor tersier yang sangat potensial menjadi keunggulan kompetitif Indonesia.

Dalam jangka menengah – panjang, kita mesti mengembangkan industri teknologi informasi, robotics dan drones, material baru (new materials), bioteknologi, nanoteknologi, dan industri berbasis inovasi teknologi lainnya yang produknya dibutuhkan umat manusia saat ini dan di masa depan.

Perbaikan infrastruktur, logistik, konektivitas antar wilayah, pembangkit listrik, dan suplai energi harus terus dibangun yang baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan industrialisasi seperti diuraikan di atas. Keempat, iklim investasi dan kemudahan berbisnis (khususnya terkait dengan pembebasan lahan, perizinan, konsistensi kebijakan pemerintah, keadilan serta kepastian hukum) juga mesti terus diperbaiki dan ditingkatkan supaya sama dengan di emerging economies yang sukses atau negara-negara maju. Kelima, memperkuat dan meningkatkan riset dan pengembangan (R & D), terutama dengan bidang-bidang IPTEK yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi dan industrialisasi di atas. Sistem dan aktivitas R & D mesti diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, supaya kita mampu mentransformasi diri (hijrah) dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen teknologi.

Akhirnya, kita harus terus menerus meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi seluruh rakyat secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, kapasitas dan akhlak SDM akan mampu menjalankan pembangunan ekonomi seperti diuraikan diatas menuju Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, Khususnya di daerah penghasil sumber

daya alam, yaitu : Daerah/Propinsi Kalimantan Timur, Aceh, Papua & Papua Barat, Riau, serta Sumatera Selatan, sebagai objek sampel penelitian dari paper ini.